**PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

**(Studi Kasus Pada Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Sumbar)**

*THE EFFECT OF THE APPLICATION OF FINANCIAL ACCOUNTING SYSTEM*

*OF LOCAL GOVERNMENT (PP 71 IN 2010) ON THE QUALITY*

*OF LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL STATEMENTS*

*(A Case Study In The Department Of Highways Boast).*

**Elfina Yanti dan Salfadri**

Program Studi Akuntansi, Ekonomi,

Universitas Ekasakti

Jln. Veteran Dalam No. 26 B, Padang

E-mail : : *elfinayanti94@gmail.com*

***Abstrak***

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesesuaian SAKD dengan SAP adalah sangat baik, bagaimana kualitas laporan keuangan pada dinas prasarana jalan, tata ruang dan permukiman adalah baik, dan apakah terdapat pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu tidak berpengaruh. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada responden sedangkan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana dan koefisien determinasi. Maka berdasarkan hasi pengujian hipotesis menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintahan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci : Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

***Abstract***

 *This study aims to determine how the fitness area of financial accounting system with Government accounting standards is very good, how is the quality of the financial statements on official road infrastructure, spatial and settlement is good, and whether there is influence the implementation of local government financial accounting system on the quality of financial report that local government have no effect. The data used in this study are primary data obtained by distributing questionnaires to the respondents while the methods of analysis used in this study is a simple linear regression analysis and coefficient of determination. So based on the hypothesis testing results show that the implementation of local government financial accounting system does not affect the quality of local government financial statements.*

***Key words :*** *local government finance accounting system, the quality of local government financial reports*

**PENDAHULUAN**

Di era reformasi ini pemerintahan diwajibkan menyusun laporan pertanggung jawaban yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh peraturan pemerintah dalam bentuk undang – undang dan peraturan pemerintah yang bersifat mengikat seluruh pemerintah daerah. Laporan keuangan pemerintah disajikan sebagai wujud pertanggung jawaban setiap entitas pelaporan yang meliputi laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan kementrian Negara/lembaga dan laporan keuangan pemerintah daerah (menurut Bastian, 2010:336 ).

Sedangkan menurut PP No. 71 Tahun 2010, Laporan Keuangan merupakan media bagi suatu entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggung jawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. itu memenuhi karakteristik ; Relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Dalam PP No. 71 Tahun 2010, Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas Laporan Keuangan merupakan media bagi suatu entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggung jawabkan kinerja keuangannya kepada publik.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa pemerintah menyusun laporan keuangan dalam bentuk prinsip – prinsip akuntansi dan menyajikan laporan keuangan daerah yang berkualitas di butuhkan Sumber Daya Manusia yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan.

Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD ) yang diharapkan akan diimplementasikan oleh pemerintah daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota, sehingga pemerintah daerah mampu menghasilkan laporan pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Jika sistem akuntansi di Indonesia di tingkat pusat diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan yakni Peraturan Menteri Keuangan No. 59/PMK.06/2005 mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, maka sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah daerah diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah dan juga didukung oleh Peraturan menteri dalam negeri No.59 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu pasal 232 yang mengatur tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Menurut Ifa Ratifah dalam Harefa (2012:30) Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dilihat dari hasil pemeriksaan BPK. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. terdapat 4 macam opini yang diberikan pemeriksa yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Pernyataan menolak memberi opini atau tidak memberi pendapat (*Disclaimer).* Berdasarkan uraian di atas penulis berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut tentang **“Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”.** (Penelitian pada Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatra Barat).

**METODOLOGI PENELITIAN**

1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menitikberatkan pengkajian pada dampak sistem akuntansi dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Sumatra Barat selama periode 2015 - 2016.

1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer. Data primer adalah sumber data penelitian yang langsung memberikan data pada pengumpulan data. Data primer dalam penelitian ini adalah jawaban responden dari kuesioner yang disebar.

1. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Data yang berasal dari APBD kemudian dianalisis dengan menggunakan Regresi Sederhana. Dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

 Y = a + bx

Dimana:

Y : Kualitas Laporan Keuangan (dependen)

X:Sistem Akuntansi Keuangan (independen)

a : Konstanta

b : Koefisien Regresi

Untuk mengetahui apakah sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan t-hitung $t\_{hitung }$dengan t- tabel $t\_{tabel }$yang terdapat dalam tabel distribusi t atau lazim disebut t- tabel.$ t\_{tabel} $.

Apabila nilai thitung ≥ ttabel maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya ada hubungan antara sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan begitu sebaliknya.

Pengujian R2 (Koefisien Determinasi)

Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya dari pengaruh variabel bebas sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah terhadap variabel terikat kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Nilai koefisien determinasi ditentukan dengan nilai adjusted R *square.*

1. Uji Asumsi Klasik
2. Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel bebas dan variabel terikat, keduanya terdistribusikan secara normal atau tidak. Normalitas juga dapat dideteksi dengan menggunakan grafik normal P-P *Plot of regression standardized residual.*  Atau dengan uji one sample Kolmogorov Smirnov dengan kriteria pengujian, Asymp. Sig > 0,05, maka data berdistribusi normal atau sebaliknya.
3. Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual, dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat digunakan metode grafik *Scatterplot* yang dilakukan dengan menggunakan uji glejer. Dengan uji gejer ini apabila p-value > 0,05 maka terdapat Heteroskedastisitas dan begitu juga sebaliknya.

**HASIL EMPIRIS DAN PEMBAHASAN**

Uji asumsi klasik yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Uji Normalitas. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji Kolmogorov- Smirnov dan dapat dilihat pada table 1 berikut:

Tabel 1. Hasil pengujian normalitas data

|  |  |
| --- | --- |
|  | TOTAL X |
| N |  | 25 |
| Normal Parametersa,b | Mean | 43.28 |
|  | Std. Deviation | 3.725 |
| Most Extreme | Absolute | .115 |
| Differences | Positive | .115 |
|  | Negative | -.086 |
| Kolmogorov-Smirnov Z |  | .574 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) |  | .897 |

Sumber: Hasil pengolahan data

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa nilai signifikan variabel independen lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua data berdistribusi secara normal.

1. Uji Heteroskedastisitas. dalam penelitian ini dilakukan dengan uji glejer dan dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Heteroskedastisitas Hasil Uji Glejer

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |
| 1(Constanta)Total X | 8.148-.079 | 6.428.148 | -.111 | 1.268-.535 | .218 .598 |

Sumber: Hasil pengolahan data

Dari hasil tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikan variabel independen lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandungheteroskedastisitas.

Setelah dilakukan uji asumsi klasik dan telah memenuhi syarat – syarat data yang baik, maka dilakukan analisa regresi. Dari hasil analisa regresi diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil uji Regresi Linear Sederhana

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |
| 1(Constant)Total X | 57.511-.370 | 13.377.308 | -.243 | 4.299-1.203 | .000.241 |

Sumber: Pengolahan data

**Y = 57.511 - 0.370 X**

Dari persamaan regresi diatas dapat kita lihat bahwa nilai signifikan menunjukkan 0,241 yang mana lebih besar dari 0,05 jika menggunakan angka 5%. Hal ini membuktikan bahwa sistem akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan pada Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman kota padang Provinsi Sumbar, yang memiliki skor 108 dan rata-rata 4,32 dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah termasuk dalam kategori sangat baik. dan hasil pengujian yang telah dilakukan yang memiliki skor 92 dengan rata – rata 3,68. dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan Kualitas laporan keuangan termasuk ke dalam kategori baik.

**KESIMPULAN**

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah dengan SAP sudah sangat sesuai. Sedangkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Kota Padang, Provinsi Sumbar, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan Kualitas laporan keuangan termasuk ke dalam kategori baik.

maka dapat disimpulkan bahwa variabel sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini mengandung arti bahwa Ho diterima atau Ha ditolak.

**DAFTAR PUSTAKA**

Bastian, Indra. 2010 . *Laporan Keuangan Pemerintahan.* Jakarta: Salemba Empat.

BPK. RI. 2012. *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011.*

Hariadi dkk 2010. *Laporan Keuangan*. Jakarta: Erlangga.

Ifa Ratifah 2012. *Kualitas Laporan Keuangan*. Jakarta: Erlangga.

Ikatan Akuntansi Indonesia. 2007. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Sistem Pengakuan / Dasar Akuntansi.

Peraturam Mentri Keuangan ( PMK No. 59/PMK.06/2005) Mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Peraturan Mentri Dalam Negri ( PMDN No. 59 Tahun 2007) Tentang Prosedur Penerimaan Kas.

Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.